

Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Tingkat Desa/Kelurahan

Oleh

Yuli Putriani

Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

Abstrak

Peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas masyarakat menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi hal ini dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi tantangan utama. Disposisi pelaksana yang termotivasi dan komitmen yang tinggi telah mendukung pelaksanaan kebijakan ini, namun diperlukan peningkatan dalam partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Desa/Kelurahan, Kabupaten Madiun, Peraturan Bupati*

Abstrak

The increasing volume of waste, in line with population growth and community activities, presents serious challenges in its management. The Madiun Regency Government has responded to this by issuing Regent Regulation No. 14 of 2022, which regulates waste management at the village and urban village levels. This study aims to analyze the implementation of this policy in Pandean Urban Village, Mejayan District, Madiun Regency. Using George C. Edwards III's policy implementation theory, which covers communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the results show that although communication has been effective, limitations in human resources and budget remain major challenges. The motivated disposition and high commitment of implementers have supported the policy's execution, yet there is a need to improve community participation and collaboration with the private sector to optimize waste management in the area.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Village/Urban Village, Madiun Regency, Regent Regulation.*

Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu utama dalam kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat, volume sampah meningkat secara signifikan, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam pengelolaannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Madiun, upaya untuk menangani permasalahan sampah telah dilakukan melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan seluruh elemen

masyarakat, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat itu sendiri. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk mengelola sampah dengan pendekatan berbasis lingkungan, serta mendorong pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Madiun No. 14 Tahun 2022 di Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah, terutama di tingkat desa dan kelurahan, serta mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan fenomena implementasi kebijakan berdasarkan data lapangan dan teori yang digunakan. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana keempat variabel tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebijakan pengelolaan sampah yang sedang diimplementasikan di wilayah tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022.

Sumber Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti kepala kelurahan, petugas kebersihan, dan masyarakat. Selain itu data diperoleh juga dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur yang relevan terkait pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu :

- a. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan, fokus pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Wawancara dilakukan terhadap pejabat kelurahan, petugas pengelola sampah, serta masyarakat yang terlibat langsung.
- b. Observasi, yaitu peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan, serta mengamati keterbatasan sumber daya dan bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan di lapangan.
- c. Dokumentasi yaitu dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta catatan rapat terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 digunakan untuk memperkuat data dari wawancara dan observasi.

Instrumen utama dalam penelitian ini, didukung oleh panduan wawancara dan lembar observasi yang disusun berdasarkan variabel dari teori Edwards III, yaitu:

- a. **Komunikasi** : Bagaimana informasi kebijakan disampaikan dan diterima oleh pelaksana dan masyarakat.
- a. **Sumber Daya** : Ketersediaan anggaran, fasilitas, serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia.
- b. **Disposisi** : Motivasi, komitmen, dan sikap dari pelaksana kebijakan.
- c. **Struktur Birokrasi** : Efektivitas prosedur dan alur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Teknik Analisis Data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama:

- a. **Reduksi Data** :Memilih data yang relevan berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- b. **Penyajian Data** : Menyusun data dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. **Penarikan Kesimpulan**: Menarik kesimpulan berdasarkan analisis variabel Edwards III untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan di Kelurahan Pandean.

Indikator Pengukuran Variabel

- a. **Komunikasi** : Kejelasan, konsistensi, dan frekuensi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
- b. **Sumber Daya** : Jumlah dan kapasitas petugas kebersihan,

- ketersediaan anggaran, serta infrastruktur pengelolaan sampah.
- c. **Disposisi** : Tingkat motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas.
- d. **Struktur Birokrasi**: Efisiensi alur birokrasi, keterlibatan berbagai instansi, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan, dengan fokus di Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh temuan yang dikategorikan berdasarkan empat variabel utama dalam teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu:

1. **Komunikasi**

Proses komunikasi kebijakan dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup, diteruskan ke camat, lurah, dan kepala desa, hingga ke masyarakat. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, penyebaran leaflet, pemutaran video, dan study tiru ke wilayah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, namun intensitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya di tingkat masyarakat, untuk memastikan partisipasi yang lebih luas.

Komunikasi dalam kebijakan ini merupakan salah satu faktor penting yang telah berjalan baik, namun sosialisasi perlu diperluas. Berdasarkan wawancara dengan aparat kelurahan, sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan langsung dan media informasi lainnya, namun cakupannya masih terbatas. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga penambahan frekuensi dan intensitas sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala utama dalam implementasi Peraturan Bupati ini. Di Kelurahan Pandean, terdapat tiga petugas pengumpul sampah yang melayani 418 keluarga, sehingga volume sampah yang dihasilkan melebihi kapasitas pengelolaan petugas. Selain itu, tidak tersedia anggaran khusus untuk pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, sehingga proses sosialisasi dan pengelolaan sampah bergantung pada retribusi kebersihan yang dibayar oleh masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan signifikan

dalam implementasi kebijakan ini. Jumlah petugas kebersihan yang terbatas menyebabkan pengelolaan sampah tidak optimal, karena sampah tidak dapat diambil setiap hari. Selain itu, infrastruktur seperti tempat pembuangan sementara (TPS) belum memadai, yang memperburuk situasi sampah di wilayah Kelurahan Pandean. Ketiadaan anggaran khusus di tingkat desa untuk pengelolaan sampah juga membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program ini secara efektif.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Para pelaksana kebijakan, baik di tingkat kelurahan maupun Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan motivasi yang tinggi dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Namun, kesadaran masyarakat yang rendah dalam memisahkan sampah dan mendukung program daur ulang masih menjadi tantangan besar. Komitmen para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara kontinyu terlihat

jelas, tetapi respon masyarakat belum maksimal.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, terutama petugas kebersihan dan aparatur kelurahan, sudah menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi. Namun, tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik. Meski sosialisasi telah dilakukan, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan dan pendekatan yang lebih intensif dari pihak pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Perbup Nomor 14 Tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan rinci, mulai dari Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, hingga kelurahan dan desa. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam alokasi tugas khusus terkait pengelolaan sampah. Bank sampah yang telah dibentuk di Kelurahan

Pandean menjadi salah satu solusi inovatif untuk membantu pengelolaan sampah, namun jumlahnya belum memadai mengingat volume sampah yang cukup besar di wilayah tersebut.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup efektif, dengan jalur komunikasi yang jelas dari pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pengelolaan sampah yang terstruktur, terutama karena tidak ada divisi khusus di kelurahan yang menangani masalah sampah. Bank sampah telah berfungsi sebagai solusi alternatif, namun jumlah bank sampah yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah yang lebih komprehensif di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan sudah berjalan dengan baik dari segi komunikasi dan struktur birokrasi,

namun masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, menambah alokasi anggaran dan tenaga kerja yang memadai, serta memperkuat kerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank sampah, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun.

Referensi

- Artiningsih. 2008. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Tesis. Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 47-64.
- Chandra, Budiman. (2006) Pengantar Kesehatan Lingkungan, EGC, Jakarta
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Habsari, D. R. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 282-93.
- Indonesiabaik.id. (2017). Oleh: Andrean W.Finaka. *Upaya Mengurangi Sampah di Indonesia*. <https://indonesiabaik.id/videografis/upaya-mengurangi-sampah-di-indonesia>. Diakses pada Kamis, 02 Mei 2024.
- Jawa Pos Radar Madiun. (2022). *Masalah Sampah di Kabupaten Madiun, Regulasi tentang Sampah Tertahan di Pemrov*. Diakses pada Jumat, 03 Mei 2024. <https://radarmadiun.jawapos.com/mejayan/801218477/masalah-sampah-di-kabupaten-madiun-regulasi-tentang-sampah-tertahan-di-pemrov>.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mahyudin, R. P. (2014). Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. *EnviroScienteeae*, 10(1), 33-40.
- Pandean, Mejayan, Madiun, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandean_n,_Mejayan,_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandean,_Mejayan,_Madiun). Diakses pada Senin, 19 Agustus 2024.
- Reinhart, Christopher, ed. (2021). *Antara Lawu dan Wilis (dalam bahasa Indonesia)*. *Kepustakaan Populer*

- [Gamedia. ISBN 978-602-481-644-5.](#)
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, 8(4), 538-560.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Sucipto. (2012). Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah. Yogyakarta: Penerbit Gosityem Publishing.
- Syahrudin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Studi Kasus (Cetakan II: April 2019). Penerbit: *Nusa Media*, Bandung.
- Suwardi, S. (2024). Inovasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan: Cooperation Government - Corporate - Civil Society. Cetakan Pertama, Juli 2024. ISBN: 978-623-508-149-6. CV. Mega Press Nusantara.
- Tchobanoglous G, Kreith F, Williams ME. 2002. Chapter 1 Introduction. In G. Tchobanoglous & F. Kreith, Handbook of Solid Waste Management Second Edition. (pp. 1.1-1.27). McGraw-Hill. United States of America.
- Waste4Change. (2023). *Permasalahan Sampah Global: Tantangan dan Solusinya*.
<https://waste4change.com/blog/permasalahan-sampah-global-tantangan-dan-solusinya/>. Diakses pada Kamis, 02 Mei 2024.
- Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno. 2005. Teori dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.